

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bambang Sugeng dilahirkan pada tanggal 31 Oktober 1913 di Tegal Rejo Magelang. Beliau menempuh pendidikan Hollands Inlandshe School (HIS) di Tegalrejo dan MULO di Purwokerto, kemudian pindah ke Yogyakarta untuk pendidikan yang lebih tinggi di AMS bagian A. Semulanya Bambang Sugeng bercita-cita menjadi seorang ahli hukum, maka beliau melanjutkan pendidikan perguruan tinggi Ilmu Hukum Jakarta.¹

Bambang Sugeng diawali sebagai Komandan Resimen TKR memulai karirnya sebagai perwira TNI. Atas dasar kecakapan dan pengalaman di dalam memimpin pasukan, pada saat itu pemerintah sedang melaksanakan reorganisasi dan Rasionalisasi organisasi militer tahun 1948, maka kolonel Bambang Sugeng diberikan tugas menjabat panglima divisi III, yang wilayah tugasnya meliputi beberapa daerah. Setelah perang kemerdekaan, pada saat Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, sehubungan keputusan presiden, Kolonel Bambang Sugeng diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.²

¹ Edi Hartoto, *Panglima Bambang Sugeng Panglima Komando Pertempuran merebut Ibukota Djogja Kembali 1949 dan Seorang Diplomat*, Jakarta: Keluarga Besar Pejuang Mantan Kasad Bambang Sugeng Dengan Referensi-Koordinasi Disbintai TNI AD dan Disejarah TNI AD, 2009, hlm. 3-4.

² *Ibid.*, hlm. 5-7.

Bambang Sugeng pada tahun 1955 meminta berhenti sebagai KSAD dengan mengajukan permohonan sebanyak lima kali kepada presiden Soekarno karena adanya perbedaan yang tidak bisa ditangani lagi. Sesuai dengan keputusan presiden RI nomor 117/M/1955 tanggal 13 Mei 1955, terhitung dari tanggal 1955 tanggal 8 Mei 1955 Bambang Sugeng diberhentikan dengan hormat atas permohonannya sendiri. Sehubungan dengan pengabdian yang penuh kesetiaan terhadap Indonesia, maka Bambang Sugeng dimintai oleh pemerintah meminta kesediannya sebagai Duta Besar. Reputasi kepemimpinannya, kapasitasnya sebagai moderator dan dialog diplomatis yang dimilikinya mengantarkan beliau sebagai prajurit TNI pertama yang di Dwi Fungsi menjadi diplomat di berbagai negara.³ perpindahan Bambang Sugeng dari Angkatan Darat ke Pejabat Diplomatik tersebut menjadi sebuah transisi atau kiprah bagi Bambang Sugeng ataupun latar belakang Bambang Sugeng yang nantinya beliau akan berperan sebagai pejabat diplomatik.

Pemerintahan pada suatu negara pasti memiliki ikatan dengan negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya politik luar negeri pada suatu negara yang memiliki kepentingan tersendiri. Hal ini terjadi karena negara dalam keadaan tidak berkecukupan, maka politik luar negeri ini bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan baik berupa barang maupun yang lainnya

³ *Ibid*, hlm.142.

supaya keadaan rakyatnya menjadi makmur.⁴ Pada zaman modern saat ini politik luar negeri lebih banyak bekerjasama dengan negara yang dianggap memiliki tingkat peradaban yang lebih maju, sehingga kerjasama tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi kemakmuran rakyat. politik luar negeri yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan menandakan adanya cita-cita dari rakyat Indonesia untuk menghilangkan kolonialisme dan imperialisme. Sehingga pada saat itu pemerintah Indonesia yang di pimpin oleh Presiden Soekarno mulai terus menerus melakukan kerjasama dengan beberapa negara yang menanggung penderitaan yang sama sebagai negara yang dalam keadaan dijajah. Keadaan tersebut untuk menyokong keinginan rakyat Indonesia untuk menghilangkan penjajahan. Dengan hubungan diplomasi tersebut Indonesia pada saat itu berharap bisa menyatukan negara-negara sahabat supaya tercapain perdamaian dunia.⁵

Sejak zaman lampau sampai hari ini hal yang sangat penting dari adanya diplomasi yaitu mempertahankan keselamatan negara, sehingga diplomasi dilakukan untuk tetap menjaga perdamaian dunia agar tetap harmonis, saling pengertian, serta bekerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang belum menemui titik terang supaya tercapai kesepakatan bersama. jika ada perbedaan pendapat atau pertentangan antara dua negara

⁴ Jusuf Suffri, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri, internasional*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm.112-113.

⁵ Trianto Saputro, *Hubungan Diplomasi Indonesia Dengan Negara-Negara Arab Pada Masa Pemerintahan Sukarno (1946-1966)*, Universitas Sanata Dharma, 2017, hlm.2-3.

yang sudah tidak dapat disepakati maka diplomasi disini tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya pihak ketiga yang mencari penyelesaian.

Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, tujuan kebijakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia lebih diarahkan untuk Indonesia diakui oleh dunia internasional atas penghapusan daerah jajahan dan melawan segala bentuk penjajahan di atas dunia⁶. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia pernah menjalin hubungan diplomasi dengan negara yang memiliki penderitaan yang sama. Bererapa negara pada saat itu memiliki hubungan yang dekat dengan rakyat Indonesia dan juga dengan pemimpinnya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peranan Bambang Sugeng Sebagai pejabat Diplomatik Republik Indonesia Tahun 1956-1964. Pembahasan tentang peranan Bambang Sugeng sebagai pejabat diplomatik menarik karena yaitu latar belakang Bambang Sugeng yang berasal dari prajurit TNI menarik untuk dikupas. Berdasarkan pada hal di atas, tahun 1956-1964 menjadi batasan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis. Tahun 1956 tanggal 1 Agustus merupakan tahun dimana Bambang Sugeng di angkat oleh pemerintah untuk menjadi Duta RI pada Tachta Suci Vatikan untuk menggantikan Duta DR. Alfian Helmi dan tahun 1964 merupakan tahun terakhir beliau menjabat sebagai duta besar di Jepang dan tahun ini paling banyak mengandung referensi atau bukti primer tentang kiprah Bambang Sugeng menjabat sebagai pejabat diplomatik dan untuk

⁶ College Ignatius, *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia*, Jogjakarta: Tintamas, 1953, hlm.2-4.

tahun selanjutnya saya tidak terlalu menemukan bukti-bukti yang bisa menguatkan skripsi saya.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peranan Bambang Sugeng Sebagai Pejabat Diplomatik Republik Indonesia Tahun 1956-1964. Untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah tersebut ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Bambang Sugeng?
2. Apa yang melatarbelakangi Bambang Sugeng menjadi seorang Diplomat?
3. Bagaimana Bambang Sugeng berperan sebagai pejabat diplomatik Republik Indonesia tahun 1956-1964?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan setiap kegiatan, terdapat suatu tujuan yang akan dijadikan sebagai sebuah pencapaian. Secara garis besar, tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui peranan Bambang Sugeng sebagai pejabat diplomatik Republik Indonesia tahun 1956-1964, yang diturunkan ke dalam beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui profil Bambang Sugeng.

2. Mengetahui yang melatarbelakangi Bambang Sugeng menjadi seorang Diplomat.
3. Mengetahui Bagaimana Bambang Sugeng berperan sebagai pejabat diplomatik Republik Indonesia tahun 1956-1964.

1.4 Kegunaan Penelitian

Proposal penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

1.4.1.1 Memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat dan semua pihak yang bernaung dalam pendidikan sejarah mengenai Peranan Bambang Sugeng sebagai Pejabat Diplomatik Republik Indonesia Tahun 1956-1964.

1.4.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan teoritis bagi para peneliti selanjutnya terutama dalam meneliti hal yang sama dengan penelitian ini yaitu peranan Bambang Sugeng sebagai pejabat diplomatik Republik Indonesia Tahun 1956-1964.

1.4.1.3 Memberikan sebuah khazanah pengetahuan baru bagi penulis dan bagi pembaca.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai Peranan Bambang Sugeng sebagai Pejabat Diplomatik Republik Indonesia tahun 1956-1964.

1.4.2.2 Bagi Akademisi

Dapat menjadi bahan rujukan dalam pembelajaran Sejarah.

1.4.2.3 Bagi masyarakat luas

Dapat menambah wawasan baru serta menjadi bahan rujukan untuk menggali lebih dalam mengenai Peranan Bambang Sugeng sebagai Pejabat Diplomatik Republik Indonesia Tahun 1956-1964.

1.4.3 Secara Empiris

1.4.3.1 Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai Peranan Bambang Sugeng sebagai Pejabat Diplomatik Republik Indonesia tahun 1956-1964.

1.4.3.2 Bagi Akademisi

Dapat dikembangkan sebagai pedoman atau acuan dalam pembelajaran Sejarah.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Kajian Teoritis

1.5.1.1 Peranan

Peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia bermula dari kata peran yang berarti pemain. adapun dalam kamus bahasa Inggris berarti (role) bermakna tugas atau pemberian seseorang atau sekumpulan orang. Peranan berasal dari kata peran yang memiliki arti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan kata peranan bermakna perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam suatu kejadian.⁷ Adapun definisi peranan menurut Soerjono Soekanto, adalah suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang individu menjalankan hak dan kewajibannya, maka telah melakukan suatu peran.⁸ Beberapa karakteristik akan ditemui dalam suatu organisasi, terdapat bermacam-macam karakteristik didalam setiap orang dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang dimilikinya.

Menurut Soedjono Soekanto, aspek-aspek yang harus ada dalam peranan, sebagai berikut:⁹

1. Peranan mencakup norma-norma yang berhubungan dengan kedudukan seseorang di dalam masyarakat.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm. 854.

⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 243.

⁹ Karel J. V., *Pengantar Sosiologi: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka. 1992, hlm. 60.

Peranan dalam hal ini yaitu rangkaian norma yang menuntun seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan adalah sebuah ide tentang apa yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan bisa di sebut sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan dengan posisi seseorang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling bergantung. Tidak ada peranan tanpa posisi seseorang ataupun sebaliknya. Setiap individu memiliki perannya masing-masing yang bersumber dari berbagai kehidupan bermasyarakatnya Hal ini mencerminkan bahwa peranan dapat menetapkan atau menggambarkan apa yang dilkukannya dalam kehidupan bermasyarakat dan mengetahui berbagai peluang yang diserahkan oleh masyarakat.

Posisi seseorang dalam masyarakat tersebut dapat menentukan tempat individu pada organisasi yang menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses, atau seorang individu yang mendiami suatu kedudukan atau tempat dan bertindak

sesuai dengan keinginan dan tanggungjawabnya dalam masyarakat.¹⁰ Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan atau *role* adalah suatu perilaku yang dimiliki oleh masing-masing orang dalam masyarakat sebagai organisasi.

1.5.1.2 Diplomasi

Sir Earnest Satow berpendapat dalam bukunya *Guide To Diplomatitc practice* menyatakan diplomatik adalah pemanfaatan kepintaran dan rencana pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan suatu negara.¹¹ Selain itu diplomasi merupakan usaha yang dilakukan untuk menjadikan pihak lain supaya dapat mengerti dan membenarkan apa pendapat kita dan jika memungkinkan mendukung pendapat kita, tanpa harus menggunakan kekerasan.¹²

KM Panikker berpendapat dalam bukunya yang berjudul *The principle of diplomacy*, diplomasi adalah sebuah seni dalam memajukan kepentingan sebuah negara dalam menjalin kerjasamanya dengan negara lain.¹³ dalam hal tersebut adalah kepentingan nasional suatu negara dalam kerjasamanya dengan dunia internasional, namun oleh sebagian pendapat diplomasi lebih

¹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 221.

¹¹ Sir Earnest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, London: Longmans, Green And Company, 1995, hlm. 2.

¹² Hasyim Djalal, *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*, Jakarta: CSIS, 1990, hlm. 30.

¹³ SL.Roy, *Diplomasi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001, hlm.21.

menegaskan terhadap negosiasi-negosiasi perjanjian atau sebagai posisi tawar-menawar dalam kejasamanya dengan negara lain. Diplomasi erat kaitanya dengan penyelesaian masalah-masalah yang dijalankan dengan cara yang damai, namun jika cara damai tersebut damai gagal untuk mendapatkan tujuan yang cita-citakan, diplomasi dapat menggunakan ancaman atau kekuatan nyata untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Sehingga perang juga bisa dikatakan salah satu sarana dalam diplomasi.

1.5.1.3 Politik

Kata politik bermula dari bahasa Yunani yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (City state).¹⁴ Negara kota di zaman Yunani, Individu saling mengadakan interaksi bertujuan agar memperoleh kemakmuran. (kebahagiaan menurut Aristoteles) dalam kehidupannya¹⁵ Politik yang meluas di Yunani pada masa itu dapat diartikan sebagai suatu pola interaksi antar sesama individu untuk memperoleh kemakmuran bersama. Politik adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dalam kehidupan. Menurut Miriam Budiarjo politik merupakan usaha untuk memberi ketentuan peraturan yang bisa diterima baik oleh

¹⁴ Hiyajat Imam, *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA press, 2009, hlm. 2.

¹⁵ Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011, hlm. 2.

banyak masyarakat, supaya mencapai kehidupan bersama yang makmur.¹⁶

Andrew Heywood berpendapat, politik merupakan suatu perbuatan bangsa yang memiliki tujuan untuk membuat, mempertahankan, dan merubah peraturan-peraturan umum yang menata kehidupannya, sehingga berarti tidak bisa lepas dari gejala konflik ataupun kerja sama.¹⁷ dari hal tersebut terlihat bahwa masyarakat politik dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara perorangan, orang dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Dengan hal tersebut membuktikan masing-masing kelompok memberikan pengaruh supaya suatu ketetapan publik yang disepakati bersama cocok dengan kepentingan suatu kelompok.

1.5.1.4 Kepemimpinan

Gary Yuki menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah perilaku seseorang yang menunjukkan kegiatan kelompok untuk memperoleh tujuan bersama.¹⁸ Mangunharjana dalam effendi menjelaskan, kepemimpinan bermula dari kata pemimpin dalam bahasa Inggris diketahui dengan sebutan *leader* dari asal kata to lead yang berarti saling berkaitan erat: memelopori, memberi petunjuk, mengarahkan,

¹⁶ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm.15.

¹⁷ Andrew Heywood, *Politik*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm.16.

¹⁸ Gary Yuki, *Kepemimpinan Dalam Organisasi Edisi Indonesia*, Jakarta: Indeks, 2011, hlm.4.

menuntun, membyerikan pengaruh kepada orang supaya bergerak..
¹⁹ adapun J.M P Fifner mengatakan kepemimpinan adalah seni mengtur dan memberikan petnjuk kepada seseorang atau kelompok untuk memperoleh tujuan yang dicita-citakan. Oteng Sutisna menyatakan kepemimpinan adalah suatu kemampuan berinisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk dan prosedur baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan berbuat begitu membangun kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.²⁰

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat berbagai sumber-sumber buku yang akan dijadikan acuan atau pijakan penulis dalam melakukan penelitian. Adapun buku-buku yang dijadikan acuan oleh penulis, yaitu:

1. Buku yang ditulis pada tahun 2012 oleh Edi Hartoto dengan judul *Panglima Bambang Sugeng: Panglima komando pertempuran merebrut ibu kota Djogja kembali 1949 dan seorang Diplomat* terbitan Kompas buku ini berisi mengenai cerita masa kecil Bambang Sugeng hingga karirinya di militer dan politik. Dalam buku , Bambang Sugeng mempunyai peran penting ketika serangan umum 1 Maret 1949. Panglima Bambang Sugeng adalah orang yang mengagas ide Propaganda Belanda melalui aksi

¹⁹ Nur Effendi, *Membangun Sekolah Yang Efektif dan Unggulan*, Yogyakarta: Lingkar Media, 2014, hlm. 343.

²⁰ *Ibid*, hlm. 344.

serangan umum yang dilakukan secara berulang kali selama hampir enam bulan lamanya.

2. Buku yang ditulis pada tahun 2018 oleh Dinas Sejarah penerbit Dinas Sejarah Angkatan Darat dengan judul *Jenderal Mayor Bambang Sugeng pengayom dan pemersatu Prajurit AD* terbitan Dinas Sejarah berisi mengenai cerita Bambang Sugeng sebagai sosok prajurit yang mengalami tiga zaman yang dimana perjuangannya dimulai pada zaman sebelum kemerdekaan, awal kemerdekaan dan masa mengisi kemerdekaan. buku ini juga menceritakan mengenai karir di dunia militer sebelum akhirnya beralih menjadi diplomatik dengan menjadi duta besar diberbagai Negara dan akhirnya beliau dipanggil yang mahakuasa dan dimakamkan di daerah Temanggung.
3. Buku yang ditulis pada tahun 2016 oleh Batara R Hutagalung dengan judul *Serangan Umum 1 Maret 1949* terbitan Matapati Presindo berisi mengenai rangkaian peristiwa yang menjadi dasar terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949 dan akibat dari peristiwa serangan umum 1 maret. selain itu didalam buku ini juga menceritakan mengenai Bambang Sugeng yang terlibat dalam serangan umum satu maret dimana perintah serangan umum satu maret itu berasal dari Bambang Sugeng yang merujuk pada

Intruksi Rahasi tertanggal 18 Februari 1949, yang berisi intruksi terhadap letkol

Dalam ketiga buku tersebut, terdapat ulasan-ulasan yang membahas mengenai Bambang Sugeng dalam perjalanannya dalam dunia militer sebelum akhirnya beralih menjadi pejabat Diplomatik. selain dari buku-buku tersebut ada beberapa sumber yang didapat dari surat kabar seperti surat kabar kompas dan Berita Buana, yang didalamnya membahas mengenai Bambang Sugeng

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi hasil penelitian Pambudi, Fauriza Rizki (2019) yang berjudul *Peran Bambang Sugeng Sebagai Deklarator Penyelesaian Konflik 17 Oktober 1952* hasil penelitiannya menjelaskan peran Bambang Sugeng dalam melaksanakan persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Angkatan Darat dan dalam rangkain tindakannya diliputi oleh banyaknya tantangan, rintangan dan godaan yang dihadapi tetapi kegigihan dan semangatnya tidak pernah putus dalam usahanya mempersatukan para perwira Angkatan Darat yang pada saat itu terkena pengaruh kepentingan diluar kepntingan Angkatan Darat dan negara secara

keseluruhan. Selama penyelesaian KSAD Jenderal Mayor Bambang Sugeng bersifat demokrasi bertindak dengan selalu meminta pendapat, tanggapan dari para perwira seniornya. Sifat setia atau patuhnya yang tertanam didalam dirinya sangatlah kuat. Walaupun pada permulaan kepemimpinan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat berbeda pendapat dengan pemerintah dalam usaha menangani permasalahan yang terjadi di dalam tubuh Angkatan Darat tetapi tetap dalam usaha penyelesaian masalah Angkatan Darat yang lainnya tetap berpusat penyelesaian tersebut kepada presiden dan wakil presiden sebagai simbol keutuhan dan persatuan.

2. Skripsi hasil penelitian Prasetya, Gustam Duga (2017) yang berjudul *Peran Bambang Sugeng Dalam Perang Kemerdekaan Di Yogyakarta 1945-1949* dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Peran Bambang Sugeng sebelum perang kemerdekaan adalah sebagai orang yang mengibarkan bendera merah putih pada saat detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di alun-alun Temanggung, adapun bentuk perjuangan Bambang Sugeng dalam perang kemerdekaan adalah sebagai Kolonel komando pertempuran dalam merebut kembali ibu kota Yogyakarta lalu akhir perjuangan Bambang Sugeng sesudah panglima Divisi I

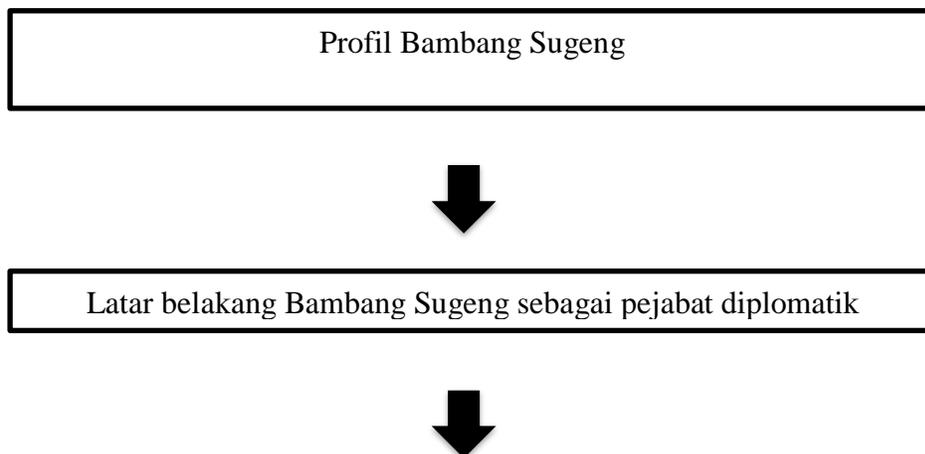
Jawa Timur, memelopori pencatatan setiap prajurit TNI atau nomer registrasi pusat (NRP), Mempersatukan para perwira Angkatan Darat kembali melalui Piagam Djogja 1995, Diangkat menjadi Duta besar Indonesia di beberapa negara seperti Vatikan, Jepang, dan Brazilia.

3. Skripsi hasil penelitian Munthohar, Ahmad (2014) yang berjudul *Tinjauan Historis Peran Panglima Bambang Sugeng Dalam Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949* dan hasil penelitiannya menjelaskan tentang beberapa peran yang dilakukan Panglima Bambang Sugeng terlihat dari kontribusinya yaitu baik berupa gagasan, kegiatan, dan usahanya. bentuk gagasan terlihat pada perintah siasat serta intruksi rahasia seperti perintah siasat tanggal 1 Januari 1949 dan intruksi rahasia tanggal 18 Februari 1949 serta perintah siasat tanggal 15 Maret 1949. Perintah siasat tanggal 1 Januari 1949 adalah suatu gagasan panglima Bambang sugeng yang dilakukan untuk melawan propaganda Belanda yang mengatakan bahwa TNI telah dihancurkan dan ibukota Republik Indonesia Yogyakarta sudah menghilang. Dan penerapan kegiatannya terlihat dalam pengeluaran intruksi rahasia pada tanggal 18 Februari 1949, yang memerintahkan kepada letnan Kolonel Soeharto sebagai komandan Wehkreise III untuk

melakukan serangan dadakan dan secara besar-besaran menggunakan bala bantuan pasukan dari brigade IX Mayor Ahmad Yani dan menegah bala bantuan masuk Yogyakarta. Sedangkan perintah siasat tertanggal 15 Maret 1949 adalah merupakan usaha antisipasi yang dikeluarkan Panglima Bambang Sugeng setelah serangan umum 1 Maret 1949.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Keberadaan konsep dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Adanya konsep penelitian ini ditujukan supaya penelitian dapat semakin terarah. Kerangka konseptual memuat hubungan antara konsep-konsep masalah yang akan diteliti oleh seorang penulis, sehingga dapat memberikan gambaran secara umum melalui kerangka berpikir dan sangat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Adapun kerangka konseptual penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:



Peran Bambang Sugeng sebagai pejabat diplomatik republik
Indonesia Tahun 1956-1964

Gambar 1. Kerangka Konseptual

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis/ metode sejarah yaitu usaha untuk merekonstruksi data-data masa lalu mengenai kisah tertentu untuk dibuat sebuah deskripsi gambaran kisah sejarah menjadi fakta yang bermakna sehingga dapat dipahami dan di mengerti oleh para pembaca²¹ penggunaan metode tersebut didasarkan pada periodisasi masa lalu (1956-1964) sementara dalam upaya peneliti menemukan data sampai kepada ilustrasi gambaran cerita dilakukan melalui 4 langkah metode sejarah diantaranya:

1.6.1 Heuristik

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penulisan sejarah, yaitu usaha untuk menemukan sumber-sumber sejarah yang diperlukan. Dalam metode penelitian sejarah, tahapan ini disebut dengan heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskein yang berarti mencari atau menemukan. Supaya memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, sumber-sumber sejarah yang begitu kompleks dan banyak jenisnya, perlu adanya

²¹ Sumadi, Suryabrata metode penelitian, Jakarta: Rajawali Press 1188. Hlm 41

klasifikasi yang dalam bentuknya dibagi menjadi, sumber tertulis, sumber lisan dan sumber benda atau artefak.²² Penelitian ini, penulis berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah dalam bentuk tulisan dan melakukan teknik analisis data berupa teknik kepustakaan. Salah satunya, yaitu Buku Panglima Bambang Sugeng: Panglima Komando Pertempuran merebut Ibu Kota Djogja Kembali 1949 dan seorang Diplomat yang berada di perpustakaan Universitas Siliwangi, surat kabar Kompas, Berita Buana yang dijadikan sebagai sumber primer. Surat kabar Kompas, Berita Buana tersedia dari bentuk fisik di lantai 8 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 11, Jakarta Pusat.

Namun, mengingat sedang dalam masa Pandemi Covid-19 dan angka penularannya yang masih tetap tinggi, penulis menghubungi pihak pustakawan bagian microfilm surat kabar lama guna memesan semua scan surat Kompas, Berita Buana. Pesanan surat kabar tersebut dikirimkan melalui Gmail dan Google Drive dalam format file pdf. Selain itu juga, penulis berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber sekunder dari buku-buku relevan di Perpustakaan Universitas Siliwangi, dan perpustakaan digital atau Ipusnas. Kemudian untuk

²² I.G. Widja, *Pengantar Ilmu Sejarah (Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan)*, Semarang: Satya Wacana, 1988, hlm. 19-21.

mendapatkan karya ilmiah, penulis menggunakan website Portal Garuda, Sinta Dikti dan Google Scholar.

1.6.2 Kritik Sumber

Apabila seorang penulis sudah menemukan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang perlu dikerjakan adalah memberikan kritikan terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik sumber merupakan sebuah upaya dalam menilai, menguji atau menyeleksi sumber-sumber sejarah agar memperoleh sumber yang benar atau relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam kritik sumber dibagi menjadi dua bagian, yaitu kritik ekstern (luar) dan kritik intern (dalam).²³

Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui apakah sumber yang ditemukan itu benar atau asli, apakah sumber yang ditemukan sesuai dengan aslinya atau tiruannya dan apakah sumber yang ditemukan itu masih utuh atau telah diubah.²⁴ Penulis harus memperhitungkan darimana sumber-sumber yang dibutuhkan berasal, bentuk fisik dari sumber, baik itu buku, karya ilmiah dan dokumen atau arsip. Penulis juga harus memperhitungkan keautentikan sumber yang bisa dilihat dari bagian awal atau bagian depan sumber, seperti

²³ *Ibid*, hlm. 21.

²⁴ *Ibid*, hlm. 22.

judul, nama penulis atau pengarang, waktu terbit, kota terbit, penerbit dan lain-lain.

Sedangkan, kritik intern bertujuan untuk memecahkan masalah, apakah sumber yang ditemukan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sebab, kritik intern ini harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber-sumber tersebut memang dapat diuji kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁵ Penulis harus mengetahui bagian dalam sumber, mulai dari daftar isi, isi atau konten setiap pembahasan, gaya bahasa, gaya penulisan dan lain-lain.

1.6.3 Interpretasi

Setelah melakukan kritik sumber, penulis akan mendapatkan banyak informasi tentang permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian. Berdasarkan informasi yang telah ditemukan, maka dapat disusun sebuah fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian, fakta-fakta tersebut disusun secara kronologis menjadi sebuah kerangka kisah sejarah, hanya belum menjadi sebuah historiografi. Supaya menjadi sebuah kisah sejarah, perlu adanya langkah interpretasi. Interpretasi bertujuan untuk menafsirkan berbagai fakta menjadi kesatuan yang utuh, harmonis dan masuk akal. Disisi lain, interpretasi sering dikatakan sebagai subyektivitas. Sebab, sebagian bisa benar dan sebagian bisa salah. Benar, karena tanpa

²⁵ *Ibid.*

penafsiran dari penulis, data tidak bisa berbicara. Penulis yang jujur akan mencantumkan dari mana fakta-fakta diperoleh, sehingga orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang.²⁶

1.6.4 Historiografi

Langkah terakhir dari penelitian sejarah, yaitu dilakukannya sebuah historiografi. Historiografi merupakan penulisan kembali secara kronologis berdasarkan urutan waktu, sehingga menjadi suatu kesatuan utuh dari peristiwa sejarah. Historiografi bertujuan untuk memberikan suatu rangkaian peristiwa sejarah yang siap dibaca oleh khalayak umum. Dalam langkah ini, penulis berusaha menghubungkan berbagai peristiwa dengan memperhatikan prinsip serialisasi atau cara-cara membuat urutan peristiwa. Prinsip serialisasi ini memerlukan aspek kronologi atau urutan waktu, aspek kausasi atau hubungan sebab akibat dan aspek imajinasi atau hubungan peristiwa yang terpisah menjadi suatu rangkaian yang masuk akal.²⁷ Jadi, langkah terakhir ini penulis akan menyajikan semua sumber dalam bentuk sebuah karya tulis yang berjudul “Peranan Bambang Sugeng Sebagai Pejabat Diplomatik Republik Indonesia Tahun 1956-1964”

²⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995, hlm. 100.

²⁷ I.G. Widja, *op.cit.*, Hlm. 24.

1.7 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam Skripsi penelitian ini supaya menjadi sistematis dan mudah dipahami, maka penyajiannya dibagi menjadi beberapa bagian:

Bagian awal, berisi sampul dan halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian Bab I berisi judul yang akan diteliti oleh penulis, yaitu Peranan Bambang Sugeng Sebagai Pejabat Diplomatik Republik Indonesia tahun 1956-1964 latar belakang masalah pengambilan judul tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Selain itu juga, bagian ini memuat tinjauan teoritis yang dibagi menjadi empat, yaitu kajian teoritis, kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan dan kerangka konseptual. Perbedaan antara kajian teori dengan kajian pustaka, yaitu kajian teori membahas tentang berbagai teori yang dipakai dan berhubungan dengan penelitian. Sedangkan kajian pustaka membahas kumpulan pustaka atau buku untuk menunjang kelancaran penelitian. Adapun metode penelitian sejarah yang terdiri dari 5 tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi masuk dan dijabarkan dalam bagian ini. Bagian Bab II, berisi jawaban dari rumusan masalah poin pertama profil Bambang Sugeng. Bagian Bab III, berisi jawaban dari rumusan masalah poin kedua tentang apa yang melatarbelakangi Bambang Sugeng diangkat menjadi seorang diplomat.

Bagian Bab IV, berisi jawaban dari rumusan masalah poin ketiga tentang Peranan Bambang Sugeng sebagai pejabat diplomatik Republik Indonesia tahun 1956-1964. Peran dari Bambang Sugeng dibahas dalam buku Panglima Bambang Sugeng: Panglima komando Pertempuran merebut ibu kota Djogja kemali 1949 dan seorang diplomat karya Edi Hartoto 2012. bukti fisiknya berada di perpustakaan Universitas Siliwangi Bagian

Bab V atau penutup, berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka yang ditulis oleh penulis dari hasil penelitiannya. saran dikemukakan temuan studi berupa simpulan hasil penelitian dan pembahasan serta dikemukakan pula saran dan hasil simpulan tersebut.

Daftar pustaka berisi sumber-sumber referensi yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi penelitian ini, baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Beberapa sumber yang digunakan, yaitu buku-buku relevan, karya ilmiah, dokumen atau arsip dari surat kabar.